

**LAPORAN KINERJA WAKIL KETUA DPR RI**  
**BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN**  
**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019 – 2020**  
**13 JANUARI – 22 MARET 2020**

---

Dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 - 2020, terhitung mulai tanggal 13 Januari hingga 22 Maret 2020, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan dalam Masa Persidangan II telah melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

**A. PERTEMUAN DENGAN DELEGASI/TAMU LUAR NEGERI**

**Kamis, 12 Maret 2020 Menerima Delegasi Partai Buruh Australia**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi Delegasi Partai Buruh Australia yang dihadiri oleh Mr. Luke Gosling MP (anggota Parlemen Australia) sebagai Pimpinan Delegasi, Mr. David Smith MP (anggota Parlemen) sebagai Wakil Pimpinan Delegasi, Mr. Michael Pettersson MLA (anggota Parlemen ACT), Councillor Megan Bridger-Darling (Wakil Walikota Maribyrnong, Victoria), Mr. Steven May (Assistant Secretary ALP cabang South Australia), Ms. Kim Pagan (Chief of Staff Meryl Swanson MP), Ms. Kate Boyd (staffer Joel Fitzgibbon MP), Mr. Daryl Morini (staffer Luke Gosling MP), Mr. Andrew Marich (staffer David Smith MP), Mr. Elias Hallaj (Project Officer, Australian Labor International) dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- Hubungan bilateral antara Indonesia-Australia saat ini sudah menginjak usia 70 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, telah cukup banyak pasang-surut yang dialami dan dilakui dalam hubungan kedua negara. Saat ini, kedua negara sudah memulai sebuah babak baru kerjasama kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
- DPR RI menyambut baik dan mendukung peningkatan kerjasama tersebut. Untuk menunjukkan dukungannya, DPR RI telah mengesahkan ratifikasi Rancangan Undang-Undang tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis, 6 Februari 2020.
- Dengan semakin eratnya Indonesia dan Australia dalam kerangka kemitraan strategis, kedua negara dapat bekerjasama dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan wabah COVID-19 baik secara kapasitas, penanganan santifik

hingga mitigasi dalam konteks situasi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

- Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, fenomena pandemic virus Corona secara signifikan mempengaruhi perdagangan kedua negara. Mengingat baik Indonesia dan Australia memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan negara-negara Asia Timur, khususnya China.
- Oleh sebab itu, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mempertimbangkan untuk mencari alternatif kerjasama investasi dan perdagangan. Terlebih saat ini, dimana Indonesia dan Australia sudah meningkatkan kerjasama kedua negara. Australia dapat mengalihkan modalnya untuk di investasikan ke Indonesia.

**Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:**

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap Indonesia dan Australia dapat bersama-sama melalui krisis di tengah merebaknya wabah COVID-19. Dengan semakin eratnya Indonesia dan Australia dalam kerangka kemitraan strategis, kedua negara dapat bekerjasama dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan wabah COVID-19 baik secara kapasitas, penanganan santifik hingga mitigasi dalam konteks situasi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).
- Lebih lanjut Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani dalam ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dapat segera ditindaklanjuti dalam berbagai kerja sama di berbagai bidang.

## **B. PERTEMUAN DELEGASI MASYARAKAT/KONSTITUEN ATAU KEGIATAN LAINNYA**

**Senin, 13 Januari 2020, Rapat Koordinasi Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan Pimpinan Ombudsman RI**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Bapak M. Azis Syamsuddin melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Ombudsman RI yang dihadiri oleh Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D dan Ibu Dr. Ninik Rahayu, S.H., MS beserta Sekjen ORI dan jajarannya, dan Perwakilan Anggota Komisi I dan II DPR RI dengan pembahasan sebagai berikut:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan beberapa bahwa hasil dari kajian maupun monitoring dari Ombudsman RI dapat dipergunakan oleh semua komisi, khususnya Komisi I, II, dan III sesuai dengan bidang yang berada dibawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan.
- Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan beberapa isu seperti:
  - Pelayanan TKI menyangkut pengurusan perpanjangan visa, dan pengiriman uang dslb.
  - Lulusan IPDN yang saat ini masih banyak instansi yang tidak mempergunakan lulusan dari sekolah tersebut.
  - Evaluasi terhadap pelayanan Kepolisian, Kementerian Hukum dan Ham.
  - Kajian terhadap pelayanan publik terkait sosialisasi Undang – Undang yang sedang dibahas kepada masyarakat.
  - Perlu dilakukan monitoring dan kajian terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat di pedesaan seperti pelayanan KTP, SKCK, Sertifikat Tanah, pelayanan passport, dan lainnya.
- Komisioner Ombudsman menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
  - Harapan dari Ombudsman RI bahwa hasil kajian atau pengawasan dapat disalurkan kepada komisi – komisi diluar Komisi II DPR RI. Namun, untuk saat ini belum ada saluran yang memungkinkan Ombudsman RI untuk menyampaikan hasil kajiannya, terutama terkait pertahanan, hukum, Pendidikan, dan kesehatan.
  - Hingga saat ini, laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman masih berkisar pada pelayanan dan kinerja Kepolisian, Pertanahan, Pelayanan Kesehatan, dan Pendidikan.
  - Ombudsman saat ini telah melakukan pendampingan serta monitoring untuk rekrutmen tantama dan bintara TNI serta SMA Nusantara. Sedangkan untuk Polri, Ombudsman sudah melakukan pendampingan selama 2 tahun terakhir.
  - Terkait Kementerian Hukum dan HAM, permasalahan yang terbesar adalah dalam penanganan Lembaga Pemasyarakatan, dimana masalah *over capacity* lapas harus melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN.
  - Ombudsman mengharapkan Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk penyempurnaan terkait kepegawaian, penyelenggaraan laporan dan penguatan kelembagaan.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta agar Ombudsman RI membuat kajian serta pengawasan terhadap layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan. Hal ini mengingat masih

banyak hambatan yang dirasakan masyarakat bawah, khususnya pada pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Sertifikat Tanah, Kesehatan, dan Pendidikan.

- Kajian yang telah disusun oleh Ombudsman RI akan dibahas dalam rapat gabungan Komisi I, II, dan III DPR RI.

#### **Senin, 20 Januari 2020, Menerima Mahasiswa Front Aktivistis Tanah Air (FAKTA)**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melakukan audiensi dengan Mahasiswa Front Aktivistis Tanah Air (FAKTA) dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

- FAKTA merupakan organisasi yang anggotanya gabungan dari Mahasiswa Universitas Nasional dan Universitas Bung Karno yang bertujuan untuk memberi pembelajaran positif kepada masyarakat agar tidak mudah termakan dengan isu – isu yang dapat mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan secara dewan.
- FAKTA berencana untuk menyelenggarakan seminar yang bertujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap berbagai isu yang tersebar di masyarakat, khususnya masyarakat kampus.

**Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:**

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mendukung rencana penyelenggaraan seminar tersebut dan berpesan agar mahasiswa sebagai agen intelektual dalam menyampaikan aspirasinya agar dilaksanakan pada forum – forum resmi dibanding melakukan aksi turun ke jalan.

#### **Selasa, 4 Februari 2020, Menerima Perwakilan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Universitas Trisakti**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melakukan audiensi dengan Perwakilan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Universitas Trisakti dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil musyawarah KAHMI Universitas Trisakti, diputuskan pembentukan sejumlah badan yang penelitian dan pengkajian yang fokus meneliti tentang kebijakan public. Badan-badan tersebut akan membawahi sejumlah Biro yang secara spesifik meneliti sejumlah bidang seperti: politik dan demokrasi; perdagangan dan pertanian; ketenagakerjaan; Pariwisata; Kelautan; investasi dan perpajakan; hingga masalah olah raga.

- Terkait hal itu, para formatur yang terpilih bermaksud mengundang Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, M. Azis Syamsuddin untuk menghadiri acara pelantikan yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2020, di XXI Kuningan, Jakarta serta meminta kesediaan untuk duduk dalam struktur Dewan Pakar KAHMI Rayon Universitas Trisakti.

**Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:**

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan kesediaannya menjadi salah satu Dewan Pakar dalam organisasi KAHMI Rayon Universitas Trisakti serta memberikan arahan untuk para pengurus KAHMI Universitas Trisakti terkait tugas dan fungsi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kamis, 6 Februari 2020, Menerima Komisi Nasional Perempuan**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Komisi Nasional Perempuan yang dihadiri oleh Maria Ulfah Ansor (Anggota Komisi Paripurna Periode 2020 – 2024), Bahrul Fuad (Anggota Komisi Paripurna Periode 2020 – 2024), Annisa (Badan Pekerja Komnas Perempuan), Detti Artsanti (Badan Pekerja Komnas Perempuan), dan Martini (Badan Pekerja Komnas Perempuan) dengan pembahasan sebagai berikut:

- Bahrul Fuad dan Ibu Maria Ulfah Ansor sebagai Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan menyampaikan rasa terimakasih kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan audiensi dengan Komnas Perempuan. Hal ini penting, karena kedepannya Komnas Perempuan memiliki tugas terkait Rancangan Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Undang – Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
- Bahrul Fuad menyampaikan harapannya agar kedepan dapat bersinergi mengingat urgensi kedua RUU tersebut yang mendesak, dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya kekerasan seksual. Walau pernah dibahas sebelumnya, namun diberhentikan padahal tingkat kekerasan seksual sudah semakin meningkat.
- RUU PPRT juga dianggap sangat penting karena dapat melindungi PRT Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Banyaknya kasus – kasus yang menimpa PRT seperti tidak adanya hak libur, hak cuti, dan hak kesehatan menjadikan RUU ini penting untuk melindungi PRT di Indonesia.

**Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:**

- RUU PPRT belum dikategorikan *carry over*, apakah masuk kedalam Prolegnas 2019 – 2024 dan harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Sedangkan untuk RUU PKS, sudah masuk kedalam Prolegnas 2019 – 2024 yang UU nya mengacu kepada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ingin di sahkan, namun terhenti di tingkat II.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjelaskan bahwa hambatan RUU PKS terhenti di Tingkat II karena RUU KUHP belum disahkan di tingkat II yang pidananya mengacu kepada KUHP, mengingat RUU KUHP adalah payung hukum dari RUU PKS.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjelaskan jika sanksi tidak mengacu pada KUHP, maka konsep naskah akademik harus diubah atau bisa dimasukkan kedalam pasal – pasal.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyatakan siap membantu menyuarakan aspirasi Komnas Perempuan ke sejumlah fraksi dan akan dicoba untuk dibuat Pansus.

**Kamis, 6 Februari 2020, Menerima Pengurus International Cricket Council dan Persatuan Cricket Indonesia**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Pengurus International Cricket Council dan Persatuan Cricket Indonesia yang dihadiri oleh perwakilan *International Cricket Council* dan Persatuan Cricket Indonesia Mr. Ed Shuttleworth (EAP Development Manager), Mr. Toby Cohen (EAP Development Officer), Mr. Rob Gomm (EAP Finance & Operation Officer), Abhiram S. Yadav (Wakil Ketua Umum PCI), Albert Tangkudung (Sekertaris Jenderal PCI), dan Afie Fiermansyah (General Manager PCI) dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- Kunjungan ICC kali ini Dalam rangka membahas persiapan turnamen Cricket Bali International Six's dan Kartini CUP yang akan diselenggarakan pada April mendatang. Selain itu, ICC juga ingin melihat persiapan dari cabang cricket dalam mengikuti PON XX 2020. Terkait dengan masuknya cabang olahraga cricket dalam Pekan Olahraga Nasional (PON), Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal sudah berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI guna membahas persiapan PON.

- Dalam kesempatan itu, ICC membawa Ed Shuttleworth development manajer baru dari Tim EAP. Tujuannya untuk mengenal dinamika cricket di Indonesia. ICC menilai Indonesia sebagai potensi yang sangat besar dan tidak bisa dihindari cricket bisa berkembang pesat di Indonesia.
- Untuk itu ICC ingin bekerja sama dengan Cricket Indonesia untuk memenuhi potensi maksimal Indonesia. Untuk mencapai itu ICC akan memastikan dan membantu pembangunan grand strategi Cricket Indonesia dalam 10 tahun kedepan. ICC juga akan membuka aplikasi untuk dana tambahan development dan Women's development untuk 15 negara. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang bisa mendapatkan dana tersebut.

**Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:**

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Bapak Azis Syamsuddin yang juga Ketua Umum Persatuan Cricket Indonesia menyampaikan melalui kerjasama yang kian erat ini, pihaknya berharap olahraga cricket ini bisa terus meraih prestasi baik di tingkat regional maupun internasional. Tak kalah penting, agar cabang olah raga asal Inggris ini bisa lebih populer di kalangan masyarakat umum.

**Jum'at 7 Februari 2020 Menerima Delegasi dari Pelajar Islam Indonesia (PII)**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Delegasi dari Pelajar Islam Indonesia (PII) yang merupakan organisasi massa Pelajar Islam yang bergerak di bidang kepelajaran dan perkaderan dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- Tujuan dari kunjungan para delegasi PII ini adalah dalam rangka menyambut Muktamar Nasional XXXI Pelajar Islam Indonesia (PII). Acara ini insyaAllah akan dilaksanakan pada tanggal 21-25 Maret 2020 di Ternate, Maluku Utara.
- Terkait hal itu, dalam kesempatan tersebut para delegasi mengundang Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk hadir dan menjadi *Keynote Speaker* dalam acara pembukaan yang akan diselenggarakan sekitar awal Maret 2020 di Jakarta.

**Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:**

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mendukung rencana penyelenggaraan Muktamar Nasional XXXI Pelajar Islam Indonesia (PII). tersebut dan juga

meminta agar PII menjadi organisasi kepemudaan yang bermartabat dan bisa diandalkan dalam mendukung terwujudnya cita-cita nasional.

- Menanggapi permohonan delegasi PII tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyatakan siap menghadiri acara pembukaan di Jakarta, dan juga menghadiri acara Muktamar di Ternate, Maluku Utara.

### **Selasa, 11 Februari 2020 Menerima Muspida dan Anggota DPRD Kota Ambon**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi Muspida dan Anggota DPRD Kota Ambon yang dihadiri oleh Richard Louhenapessy (Walikota Ambon), A.G Latuheru (Sekda Kota Ambon), Gerald Mailoa (Wakil Ketua DPRD Kota Ambon), Perwakilan Kodam VXI Pattimura, Zeth Pormes (Komisi I DPRD Kota Ambon), Apries Gaspers (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Ambon), dan Feberien (Bappeda Litbang Kota Ambon) dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- Pada tahun 1775, Bangsa Portugis membangun sebuah benteng, yang diberi nama Benteng Victoria, yang selanjutnya diambil alih oleh Belanda. Belanda kemudian menjadikan benteng ini sebagai pusat pemerintahan untuk mengeruk harta kekayaan masyarakat pribumi, berupa rempah-rempah yang melimpah di bumi Maluku. Dan, tepat di depan benteng inilah pahlawan nasional bernama Pattimura digantung, yakni pada tanggal 6 Desember 1817.
- Ketika Indonesia merdeka, benteng ini dijadikan Tentara Nasional Indonesia sebagai Markas Komando Daerah Militer XVI Pattimura. Namun karena semakin cepatnya perkembangan lingkungan strategis global, regional, maupun nasional, TNI menilai bahwa posisi benteng ini sudah tidak terlalu layak lagi menopang kebutuhan strategis KODAM XIV Pattimura.
- Terkait hal itu, pemerintah Kota Ambon bersama dengan segenap unsur Muspida akhirnya sepakat untuk memindahkan Mako Kodam Pattimura dari Benteng Victoria ke lokasi yang baru. Rencananya, Benteng Victoria akan dijadikan sebagai situs cagar budaya untuk wisata sejarah nusantara.
- Mengingat keputusan pemindahan ini bersifat penting dan memiliki dampak yang luas, maka para anggota Muspida Kota Ambon, berkunjung ke sejumlah pihak untuk meminta saran dan masukan atas rencana tersebut, salah satunya adalah menemui Wakil Pimpinan DPR RI/Korpolkam.

- Walikota Ambon menjelaskan tentang Revitalisasi Benteng Victoria dan Relokasi Makodam XVI Pattimura yang sudah berjalan sejak tahun 2016. Beliau juga menyatakan bahwa pada tahun 2015 lalu, Pemerintah Kota telah berdiskusi dengan pihak Kodam, dan pihak Kodam menyetujui rencana tersebut.
- Setelah mendapat persetujuan, pihak Pemkot Ambon kemudian membentuk kelompok kerja bersama Kodam XVI Pattimura dan telah bekerja secara intens terkait hal tersebut. Kelompok kerja juga sudah mendatangi dan meminta restu dari KASAD TNI-AD.
- KASAD TNI-AD menyatakan kesediaannya untuk segera menyerahkan Benteng Victoria kepada Pemerintah Kota Ambon. Dan bentuk penyerahannya dalam bentuk reslah/penukaran. Jadi Pemkot menyiapkan lahan untuk di survei, dan telah disepakati bersama untuk Benteng Victoria akan diserahkan kepada Pemkot untuk pengelolaannya.

**Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:**

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Bapak M. Azis Syamsuddin setelah mendengarkan penjelasan Walikota Ambon, mengungkapkan, jika telah mendapat persetujuan dari KASAD TNI, maka DPR RI akan mendorong baik melalui rapat-rapat komisi maupun anggaran untuk mendukung proses tersebut.
- Lebih jauh, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Bapak M. Azis Syamsuddin juga meminta agar Benteng Victoria benar-benar dijadikan sebuah destinasi wisata sejarah yang edukatif. Untuk perlu dilengkapi juga dengan sejumlah sarana informasi baik dalam bentuk gambar, artefak, maupun perpustakaan.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta agar Benteng Victoria benar-benar dijadikan sebuah destinasi wisata sejarah yang edukatif. Untuk perlu dilengkapi juga dengan sejumlah sarana informasi baik dalam bentuk gambar, artefak, maupun perpustakaan.

**Jum'at 13 Maret 2020, Menjadi *Keynote Speaker* pada acara Seminar Nasional Dewan Pengurus Nasional "Sahabat Polisi"**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi *Keynote Speaker* pada acara Seminar Nasional Dewan Pengurus Nasional "Sahabat Polisi" dengan tema "Bahaya Penyebaran Paham

Radikalisme Dan Upaya Pencegahannya” yang bertempat di Swiss Belhotel Mangga Besar, Jakarta dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam menyatakan komitmennya sebagai Pimpinan DPR RI untuk selalu mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi ancaman radikalisme dan terorisme.
- Sebelum ini, DPR RI selalu sigap mendukung upaya pemerintah dalam setiap langkahnya dalam mempertahankan NKRI dari semua bentuk tantangan dan ancaman, termasuk salah satu yang cukup menonjol akhir-akhir ini adalah ancaman dari kelompok radikal dan terorisme yang mengatas-namakan agama.
- Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Bapak M. Azis Syamsuddin juga mengingatkan bawah saat ini situasi politik dan keamanan dunia sedang tidak menentu. Untuk itu, bangsa Indonesia harus selalu siap pada semua bentuk perubahan wajah ancaman.
- Pada akhirnya, kita semua menyadari tingginya ancaman radikalisme ini. Tapi untuk mereduksi kekuatan mereka, dibutuhkan kecermatan, kehati-hatian dan sinergitas dari semua elemen bangsa. Jangan sampai, niat baik untuk memerangi radikalisme, ekstrimisme tersebut, justru menjadi bentuk teror itu sendiri.
- Kita semua menyadari tingginya ancaman radikalisme ini. Tapi untuk mereduksi kekuatan mereka, dibutuhkan kecermatan, kehati-hatian dan sinergitas dari semua elemen bangsa.

#### **Jum'at 13 Maret 2020, Menjadi *Keynote Speaker* pada acara Diskusi Bersatu Melawan Corona**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri Diskusi dengan Tema “Bersatu Melawan Corona” yang dilaksanakan di Coffee Shop Little League, Petogogan Jakarta dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- Tahun 2020 diawali dengan merebaknya wabah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Novel-Korona (nCovid). Virus yang pertama kali menyebar pada akhir 2019 di kota Wuhan, RRT ini diduga berasal dari hewan liar yang diperjual belikan di Pasar Grosir Makanan Laut Huanan. Dalam waktu kurang dari empat bulan semenjak kasus ini muncul, penyebaran akan wabah ini tidak hanya membuat Wuhan terisolir, namun juga sudah nyaris menjadi pandemic global.

- Untuk di Indonesia sendiri, laporan resmi pemerintah terkini menunjukkan bahwa terdapat 27 orang (baik WNI maupun WNA) yang sudah dinyatakan positif mengidap Covid-19. Pengumuman akan teridentifikasinya kasus Covid-19 di Indonesia itu sudah dinanti-nantikan sejumlah pihak baik dari dalam, dan terutama dari luar negeri. Banyaknya pihak yang skeptis terkait nihilnya kasus Covid-19 di Indonesia, mengingat sejumlah faktor, seperti banyaknya jumlah penduduk Indonesia, luas wilayah Indonesia yang besar, letak negara Indonesia yang berdekatan dengan sejumlah negara yang memiliki kasus cukup signifikan, seperti Singapura, serta lokasi Indonesia yang menjadi salah satu destinasi utama pariwisata di Asia-Pasifik.

**Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:**

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menekankan perlunya meredam kepanikan public, dan pentingnya strategi pengendalian informasi yang masuk ke tengah masyarakat. Pada dasarnya, informasi yang benar adalah yang paling diperlukan untuk mengendalikan kepanikan dan pilihan respon publik.
- Strategi komunikasi yang tepat. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi politik pemerintah dan pemberitaan media perlu lebih positif dan edukatif. Karena pada akhirnya, benteng terkuat untuk melawan ancaman epidemi seperti ini adalah kesadaran masyarakat itu sendiri.
- Mengoptimalkan pola penanganan yang tepat. Sejauh ini, dari 37 suspect yang dinyatakan positif mengidap Corona, belum ada satupun yang berhasil disembuhkan. Data ini tidak secara otomatis menunjukkan kelemahan pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun akan lebih baik bila ada pasien yang berhasil disembuhkan. Setidaknya ini akan menambah optimisme publik tanah air di tengah kepanikan global yang terjadi.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan pentingnya menjaga optimisme pasar agar iklim perekonomian nasional tetap kondusif. Untuk itu, pemerintah perlu selalu mengaktifkan Inpres No 14 tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
- Inpres ini adalah bentuk ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap Joint External Evaluation tools yang dibuat WHO pada tahun 2017. Selain untuk menjaga optimism pasar, Inpres ini juga bisa menjamin bahwa setiap strategi dan tindakan diambil oleh pemerintah Indonesia selalu seirama dengan strategi penanggulangan yang dilakukan oleh otoritas internasional.

### **C. KUNJUNGAN KERJA DALAM NEGERI**

#### **Selasa, 18 Februari 2020, Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Selatan**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjadi *Keynote Speaker* dalam acara Rapimnas PERMAHI 2020 dengan tema “Sinergitas PERMAHI Progresif Guna Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berwibawa dan Berkeadilan” dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menegaskan, peraturan hukum harus mampu menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara terhadap perlindungan hukum. Menurutnya, sebagus apapun peraturan hukum yang dibuat, jika tidak dilakukan dan tidak diperkuat dengan aturan hukum dan mekanisme yang ada, maka, peraturan hukum tidak dapat berjalan dengan baik.
- Rule of Law (peraturan hukum) adalah instrument rekayasa sosial yang nantinya akan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Instrument ini, adalah produk dari sebuah proses politik rigit. Hulunya tidak lain adalah proses Pemilu, yang kualitasnya bergantung pada hasil pilihan setiap individu masyarakat. Dimana dari hasil pilihan masyarakat itu, akan ditentukan sebaik apa kualitas para Anggota DPR dan pemerintah (Presiden) yang akan membuat peraturan hukum.
- Dengan demikian, bila melihat substansinya, keadilan sosial yang dituntut oleh setiap individu sebenarnya bisa dikembalikan pada tiap individunya. Oleh sebab itu, membangun kualitas para pemilih dalam pemilu, sebenarnya suatu hal yang fundamental dalam proses membentuk keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap Rapimnas Permahi 2020 dapat menghasilkan kesimpulan dan kesepakatan dengan tujuan agar penegakan hukum dapat sesuai dan menyentuh rasa keadilan di seluruh lapisan masyarakat.

#### **Selasa, 28 Februari 2020, Kunjungan Kerja ke Kota Sawahlunto, Sumatera Barat**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjadi *Keynote Speaker* pada acara Diskusi dengan tema “Memperkuat Eksistensi Karang Taruna Melalui Implementasi Permendagri 18/2018” dengan pembahasan sebagai berikut:

- Dalam rangka memperkuat eksistensi Karang Taruna, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengungkapkan perlu adanya konsolidasi organisasi secara sinergis dan berkesinambungan. Selain pembinaan dan pengawasan dari pemerintah, masyarakat di wilayah tersebut juga harus tergerak untuk turut berpartisipasi bagi keberlangsungan karang taruna.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diharapkan mampu memberikan dukungan bagi perkuatan eksistensi Karang Taruna di zaman ini.
- Perjuangan bangsa jangan sampai berhenti di generasi tua namun juga harus dapat dilanjutkan oleh kaum muda bangsa Indonesia sesuai dengan semangat kebangsaan. Generasi muda yang aktif dan berkualitas menjadi tonggak kemajuan negara Indonesia, masa kini dan masa depan.
- Karang taruna dapat menjadi wadah untuk memupuk dan mempertahankan solidaritas masyarakat juga menjaga kearifan lokal masyarakat. Karang taruna membentuk karakter nasionalisme dalam jiwa anak muda. Akan tetapi, eksistensi karang taruna semakin hari semakin redup, padahal banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Karang Taruna.
- Saat ini adanya kesan bahwa Karang Taruna merupakan wadah pemuda yang fokus pada kegiatan ROKA (Rekreasi, Olahraga, Kesenian dan Agama) dan hanya mengadakan kegiatan pada hari-hari libur nasional saja. Stigma tersebut yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya minat masyarakat dan pemerintah desa terhadap pengembangan Karang Taruna.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap Karang Taruna Sawahlunto Masa Bakti 2019-2024 untuk bisa memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam membentuk dan memperkuat nilai-nilai sosial di masyarakat. Dalam hal ini, karang taruna diharapkan mampu berdaya guna dan memiliki efektivitas serta bermanfaat di dalam pengaplikasian program kerjanya di lingkungan masyarakat.

### **Rabu, 4 Maret 2020 Kunjungan Kerja ke Kota Lhoksemauwe, Provinsi Aceh**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Lhoksemauwe, Provinsi Aceh dalam rangka menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional Universitas Malikussaleh dengan tema "Revitalisasi Pancasila Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Dan Pelanggaran Ham Di Indonesia Pada Era Post Truth" yang

dilaksanakan di GOR ACC Cunda, Lhokseumawe, Aceh dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin menyerukan kepada para mahasiswa, agar bisa menjaga dan membela Pancasila. Hal itu bisa dilakukan jika mahasiswa menerapkan Pancasila di lingkungan kampus dalam upaya memberantas korupsi dan kejahatan hak asasi manusia (HAM).
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa dalam UUD Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dan normatif. Cara menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasar ketentuan negara hukum adalah dengan melakukan pemberantasan korupsi, maupun memberantas pelanggaran HAM.
- Kedepannya perlu penguatan hukum untuk memberantas korupsi dan pelanggaran HAM. Diperlukan pula penguatan struktur aparat penegak hukum. Karena itu, lembaga penegak hukum secara struktural bersifat vertikal seperti Polri, Kejaksaan, KPK, PPNS, yang ujungnya nanti akan masuk ranah yustitia dalam hal ini pengadilan.
- DPR RI terbuka terhadap masukan dan koreksi untuk kemudian dibahas dalam menentukan kebijakan yang dituangkan di undang-undang bersama pemerintah.

### **Rabu, 10 Maret 2020 Kunjungan Kerja ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam rangka menjadi narasumber pada acara Seminar Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Intercontinental – Bandung dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam menyampaikan, bahwa pembangunan yang telah kita jalankan selama ini sudah cukup baik, terlihat dengan banyaknya pembangunan fisik, termasuk pertumbuhan ekonomi berkisar 5%/tahun selama 5 tahun terakhir. Pemerintah juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah sekitar 5,3%. Melihat fokus program pemerintah dan pencapaian 5 tahun terakhir, bisa dipastikan pertumbuhan dunia usaha akan semakin baik di tahun-tahun mendatang. Namun tantangan yang kita hadapi

saat ini dan ke depan berbeda dengan 5 tahun yang lalu, terlebih kita telah memasuki tahap revolusi industri 4.0.

- Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia ke depan adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, dunia yang semakin mengelompok dalam pertumbuhan regional, persaingan regional yang semakin terbuka untuk mengundang investasi negara maju, dan semakin cepatnya perubahan teknologi dan permintaan pasar. Jika tidak diantisipasi dan disiapkan dari sekarang berbagai kebijakan pemerintah, maka hal ini dapat mempengaruhi posisi Indonesia di mata investor asing.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menekankan bahwa jauh lebih penting lagi adalah bagaimana menggairahkan pelaku ekonomi dalam negeri (UMKM, Koperasi, Usaha Besar & BUMN) untuk lebih giat melakukan investasinya dan mampu menjadi tuan rumah yang berdaulat dalam mengelola sumber daya yang berlimpah dengan pasar domestik yang berjumlah ratusan juta potensi pasar.
- UMKM (data Kemenkop & UKM 2017) sesungguhnya merupakan kumpulan unit usaha yang berjumlah 62,9 juta unit (99,99%) dibandingkan Usaha Besar 5460 unit (0,09%). Selain itu UMKM menyerap 116,4 juta tenaga kerja (97%) dibanding Usaha Besar yang menyerap 3,8 juta tenaga kerja (3%). Namun jumlah UMKM yang besar baru mampu berkontribusi sebesar 60.34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 15,8% terhadap ekspor nasional non-migas.
- Untuk koperasi, perkembangan yang dicapai saat ini terlihat dari jumlah anggota koperasi yang tercatat sekitar 20 juta orang (data Kemenkop UKM 2018) dengan jumlah koperasi mencapai 209.959 unit. Sehingga rata-rata setiap koperasi beranggotakan sekitar 95 orang
- Angkatan kerja saat ini yang tercatat sebesar 133,5 juta orang, dimana yang bekerja berjumlah 126,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, diantaranya 36,5 juta orang tidak bekerja penuh waktu. selebihnya ada sekitar 7 juta orang yang menganggur (sumber BPS).
- Melihat informasi yang demikian, maka Omnibus Law harus mampu menjawab tantangan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk bersaing dalam negeri maupun luar negeri, mempercepat pemerataan hasil pembangunan serta mampu menurunkan jumlah pengangguran. Untuk hal ini, maka peran UMKM, Koperasi dan Usaha Besar harus bersinergi sehingga satu sama lainnya dan sama-sama memberikan nilai tambah bagi pelaku pasar mitranya.

- Omnibus Law merupakan kesempatan dan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dengan memperkuat (Menko Perekonomian):
  - Peningkatan Ekosistem Investasi & Kegiatan Berusaha
  - Ketenagakerjaan
  - Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi
  - Kemudahan Berusaha
  - Dukungan riset dan inovasi
  - Pengadaan lahan
  - Kawasan ekonomi
  - Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
  - Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk mendukung Cipta Kerja
- Melihat informasi yang demikian, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menekankan perlu bagi kita semua mensukseskan Omnibus Law ini dengan seksama, melalui diskusi yang konstruktif sehingga dapat diterima dan tepat sasaran, dan yang paling penting berhasil dalam penerapannya di lapangan menuju cita-cita kemerdekaan.

**Mengatahui,  
Kepala Bagian Set. Watua DPR RI  
Bidang Politik dan Keamanan**

  
**DANIS MAYA, S.H**  
NIP. 19741026 199903 1 004